

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan cara “klitih” sangat mengkhawatirkan. Tindak pidana ini ternyata berdampak membahayakan bagi nyawa orang. Korban yang dijadikan target tidaklah ditentukan terlebih dahulu, sehingga berlandaskan fenomena ini dapat diketahui bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan Polda DIY dalam penanganan kenakalan anak berupa penganiayaan dengan cara “klitih”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bentuk kebijakan yang dilakukan Polda DIY dalam menekan kenakalan anak berupa penganiayaan dengan cara “klitih”, pelaksanaan kebijakan Polda DIY dalam penindakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dengan cara “klitih”, serta mengetahui makna keadilan substansial dalam pelaksanaan kebijakan dalam penindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara “klitih”.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yakni deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, observasi langsung dan pencatatan dokumen. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan teori kebijakan, teori penegakan hukum, teori bekerja hukum di masyarakat dan teori keadilan.

Hasil penelitian yang dihasilkan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Polda DIY dalam kasus penganiayaan yang bermodel “klitih” dilakukan dengan menerapkan pasal pada KUHP, dengan pertimbangan melihat kondisi korban dan dasar yuridisnya yaitu Pasal 351 KUHP. Penerapan ini didasarkan apabila dalam proses penegakan hukum keadaan korban sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) dan (2) yaitu luka ringan dan berat, maka pelaksanaan diversi dapat dilanjutkan, namun jika korban tersebut kondisinya sebagaimana terdapat Pasal 351 KUHP Ayat (3) maka pelaksanaan diversi tidak dapat dilakukan. Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Polda DIY dalam penyelesaian kasus penganiayaan dengan model “klitih” tidak bisa terselesaikan hanya menggunakan penerapan diversi atau dengan penerapan ancaman menggunakan Pasal 351 KUHP, karena masih banyak ditemui pelaku yang menutupi peristiwa tersebut. Perwujudan keadilan substansial terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara “klitih” dilakukan dengan memberlakukan KUHP apabila kondisi korban tersebut memang dianggap parah atau meninggal dunia, namun demikian proses secara formil dalam pengungkapannya tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena pada intinya dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hukum positif yang saling melengkapi satu dengan lainnya.

Kata Kunci: Keadilan Substansial, Penganiayaan, Anak Pelaku Tindak Pidana, Klitih

ABSTRACT

The crime of child abuse in the Special Region of Yogyakarta by "klitih" is very worrying. This crime turned out to have a dangerous impact on people's lives. The targeted victims were not determined in advance, so based on this phenomenon it can be seen the form of law enforcement efforts carried out by the Yogyakarta Regional Police in handling juvenile delinquency in the form of child abuse by means of "klitih".

This study aims to analyze the form of policies carried out by the Yogyakarta Regional Police in suppressing juvenile delinquency in the form of abuse by means of "klitih", the implementation of the DIY Regional Police's policy in the act of criminal acts of child abuse committed by "klitih", as well as knowing the meaning of substantial justice in the implementation of policies in enforcement. against children who commit criminal acts of persecution by means of "klitih".

The research method used in this study is the empirical juridical method. The research specifications that I use are descriptive analysis. Data collection techniques are done by in-depth interviews with parties involved in research, direct observation and document recording. The research problem is analyzed with policy theory, law enforcement theory, law enforcement work in society and justice theory.

The results of the research resulted in policy making carried out by the Yogyakarta Regional Police in cases of persecution with a "klitih" model carried out by applying the article to the Criminal Code, with consideration of seeing the condition of the victim and its juridical basis, namely Article 351 of the Criminal Code. This application is based if in the process of law enforcement the victim's condition is in accordance with Article 351 Paragraphs (1) and (2), namely minor and severe injuries, the implementation of diversion can be continued, but if the victim is in conditions as contained in Article 351 of the Criminal Code Paragraph (3) then the implementation diversion cannot be done. The implementation of the policy carried out by the DIY Regional Police in solving cases of persecution using the "klitih" model cannot be resolved using only the application of diversion or the application of threats using Article 351 of the Criminal Code, because there are still many perpetrators who cover up the incident. The realization of substantial justice towards children who commit criminal acts of mistreatment by means of "klitih" is done by imposing the Criminal Code if the condition of the victim is indeed considered severe or dead, however the formal process in his disclosure continues to use Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System Children because in essence in the Criminal Code and Law Number 11 Year 2012 concerning the Juvenile Justice System the positive law is complementary to one another.

Keywords: *Substantive Justice, Abuse, Children as Criminal Acts, Klitih*